BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kehutanan
Edisi : 18 Maret 2008
Halaman : 14

Tolak PP Penyewaan Hutan

Walhi Galang Dana 34,6 Miliar

[JAKARTA] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, hingga saat ini telah mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp 34, 6 miliar sebagai upaya menyelamatkan hutan lindung di Indonesia. Upaya tersebut merupakan bentuk penolakan atas peraturan pemerintah (PP) 2/2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang dapat merusak ekosistem.

"Dana itu merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk menolak aturan yang dikenal PP Penyewaan Hutan itu," kata Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, saat aksi di kantor Departemen Keuangan (Depkeu), di Jakarta, Senin (17/3). "Jika pemerintah tidak mencabut PP itu, dana itu akan kami gunakan untuk menyewa hutan lindung, dan hutan tersebut akan kami biarkan saja agar tidak rusak oleh aktivitas pertambangan," katanya.

Pada hari itu, rencananya Walhi bersama puluhan pengacara yang tergabung dalam Pengacara Penyelamat Hutan Indonesia dijadwalkan berdialog dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait penolakan PP tersebut. Namun, rencana tersebut batal, karena Sri Mulyani harus mengadakan rapat kerja DPR. Walhi dan para pengacara tersebut akhirnya, hanya ditemui Kepala Biro Humas Depkeu, Samsuar Said.

Chalid mengatakan, kedatangannya ke Depkeu bertujuan mendesak pemerintah, untuk mencabut PP 2/2008. Jika pemerintah enggan untuk mencabut PP tersebut, Menkeu harus membuat mekanisme yang jelas selama dua tahun agar rakyat dapat turut serta menyewa hutan.

Senada hal itu, juru bicara pengacara, Chairilsyah mengatakan pemerintah seharusnya bicara kepada rakyat bila tidak memiliki uang untuk mengelola negara dan jangan langsung menjual hutan lindung untuk membiayai keuangan negara. Menurutnya, PP tersebut merupakan kebijakan yang cacat secara yuridis, moral, dan ekologis dan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Dengan biaya sewa hutan sebesar Rp 300 per meter persegi (m2), pemerintah berupaya mendapatkan keuntungan 2,78 triliun per tahun dari penyewaan hutan. Chairil memperkirakan bila kebijakan tersebut dilaksanakan hutan bertahan paling lama 20-30 tahun. [SYH/M-15]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup